

ANALISIS REALISASI ANGGARAN VS ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA APBD PROVINSI JAWA BARAT

¹Viena Amalia Sagita

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: vienaamalia01@gmail.com

Abstract

Efficient and effective regional budget management is essential for supporting development and delivering public services. This study analyzes the gap between planned and actual budgets in the financial statements of the West Java Provincial Government for 2022 and 2023, focusing on three main components: operational expenditure, capital expenditure, and contingency spending. Data were obtained from the Audit Reports of the West Java Provincial Financial Statements by the Supreme Audit Agency of Indonesia (BPK RI). The findings reveal that both operational and capital expenditures achieved high realization rates and showed upward trends, indicating improved budget efficiency. In contrast, contingency spending exhibited significant deviations, with extremely low realization percentages (19.98% in 2022 and 5.55% in 2023), suggesting budget overestimation, administrative barriers, and limited actual necessity. These results highlight the need for budget planning reform focused on actual needs and enhanced managerial capacity to ensure more effective, efficient, and accountable regional financial management.

Keywords: APBD, budget deviation, unexpected spending, regional financial efficiency, West Jawa

Abstrak

Pengelolaan anggaran daerah yang efisien dan efektif adalah kunci utama dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022 dan 2023, dengan penekanan pada tiga pos utama: Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Data diperoleh dari Laporan Hasil Penilaian terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat oleh BPK RI. Temuan riiset menunjukkan bahwa Belanja Operasional dan Belanja Modal memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dan cenderung meningkat, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Akan tetapi, Belanja Tidak Terduga menunjukkan penyimpangan yang signifikan, dengan persentase realisasi yang sangat rendah (19,98% pada 2022 dan 5,55% pada 2023), yang mengindikasikan adanya overestimasi anggaran, hambatan administratif, serta minimnya kebutuhan nyata akan dana tersebut. Penemuan ini menegaskan perlunya reformulasi perencanaan anggaran yang berfokus pada kebutuhan serta peningkatan kapasitas manajerial agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: APBD, deviasi anggaran, belanja tidak terduga, efisiensi keuangan daerah, Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk otonomi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya demi pembangunan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). APBD berperan penting sebagai instrumen utama dalam penyaluran dana yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Halim, 2022), serta berfungsi sebagai sarana

akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan deviasi antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran yang tercatat dalam laporan keuangan daerah. Deviasi ini bisa timbul karena berbagai alasan, termasuk perubahan situasi ekonomi, hambatan teknis dalam pelaksanaan program, serta faktor administratif dan birokrasi yang rumit (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Deviasi yang besar dapat menghalangi tercapainya target pembangunan dan menurunkan efisiensi layanan publik, sehingga analisis mendalam diperlukan untuk memahami faktor penyebab dan konsekuensinya.

Mengacu pada latar belakang itu, penelitian ini memiliki tujuan menganalisis perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran yang telah direncanakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan yang diteliti mencakup: (1) sampai seberapa besar deviasi antara anggaran dan realisasi pada APBD Provinsi Jawa Barat? (2) faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap deviasi tersebut? dan (3) apa dampak deviasi anggaran terhadap efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut?

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dinamika penyimpangan anggaran. Hasil penelitian secara praktis dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan studi kasus pada APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Data yang dipakai adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data ini mencakup rincian anggaran yang direncanakan, pelaksanaan anggaran, serta persentase pelaksanaan pada tiga kategori utama, yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara nilai anggaran dan realisasi di setiap pos untuk kedua tahun anggaran. Selanjutnya, dilakukan penghitungan deviasi baik dalam bentuk nominal maupun persentase, untuk mengidentifikasi pos-pos yang mengalami pergeseran paling signifikan. Penelitian ini secara khusus menekankan Belanja Tidak Terduga, karena data menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

Dalam rangka mendukung analisis data, penelitian ini juga melaksanakan tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor penyebab deviasi anggaran, seperti perencanaan yang sangat hati-hati, kendala administratif, serta elemen eksternal yang memengaruhi kebutuhan sebenarnya di lapangan. Analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan ilustrasi mengenai efisiensi pengelolaan anggaran daerah serta memberikan saran perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan. Keabsahan data dipelihara dengan memanfaatkan sumber resmi dan membandingkan temuan dengan studi-studi sebelumnya yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

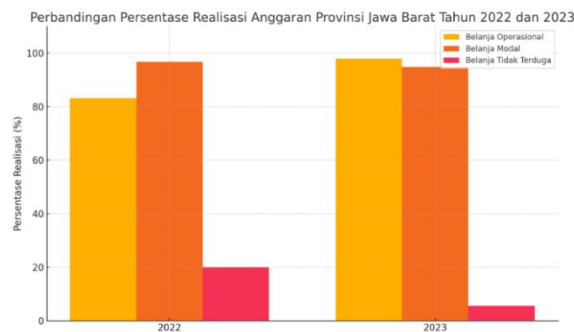
Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2023

Tabel 1. Perbandingan Anggaran, Realisasi, dan Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Pos Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2022	Belanja Operasional	121.016.175.488	100.627.276.442	20.388.899.046	83,15%
	Belanja Modal	9.276.666.788	8.974.945.815	301.720.973	96,75%
	Belanja Tidak Terduga	468.969.961.965	93.700.984.191	375.268.977.774	19,98%
2023	Belanja Operasional	19.515.920.017.639	19.092.270.596.143	423.649.421.496	97,83%
	Belanja Modal	2.661.567.412.576	2.523.831.913.631	137.735.498.945	94,83%
	Belanja Tidak Terduga	425.194.924.725,00	23.602.781.810	401.592.142.915	5,55%

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023 & 2024)

Gambar 1. Persentase Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023 pada Tiga Pos Utama Belanja



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023 & 2024)

Tabel dan diagram di atas memberikan perbandingan menyeluruh antara anggaran dan realisasi pengeluaran untuk tiga pos utama, yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, sepanjang dua tahun fiskal 2022 dan 2023.

Dalam **Belanja Operasional**, terjadi peningkatan signifikan pada anggaran dan realisasi belanja operasional antara tahun 2022 dan 2023. Yang menarik adalah persentase pencapaian juga

meningkat secara signifikan dari 83,15% pada tahun 2022 menjadi 97,83% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan pengeluaran operasional pada tahun 2023, walaupun dengan ukuran anggaran yang jauh lebih besar. Kenaikan efisiensi ini adalah sebuah kecenderungan positif yang harus dijaga.

Untuk **Belanja Modal**, anggaran menunjukkan persentase realisasi yang tetap tinggi di kedua tahun, yaitu 96,75% pada tahun 2022 dan 94,83% pada tahun 2023. Walaupun terdapat penurunan kecil dalam persentase realisasi pada tahun 2023, angka itu masih sangat baik dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap investasi jangka panjang. Peningkatan signifikan dalam anggaran belanja modal di tahun 2023 juga menunjukkan adanya lebih banyak atau lebih besar proyek-proyek investasi.

Namun, **Belanja Tidak Terduga** menjadi fokus utama. Baik pada tahun 2022 maupun 2023, pengeluaran tak terduga menunjukkan angka realisasi yang sangat rendah, bahkan mengalami penurunan signifikan dari 19,98% pada tahun 2022 menjadi hanya 5,55% pada tahun 2023. Perbedaan antara anggaran dan realisasi juga sangat signifikan di kedua tahun itu. Ini menunjukkan dua kemungkinan: pertama, anggaran untuk pengeluaran tak terduga mungkin terlalu besar dan tidak rasional dari awal; kedua, mungkin terdapat hambatan dalam pelaksanaan atau pencarian kebutuhan mendesak yang seharusnya ditangani oleh pos ini. Situasi ini perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mencegah pemborosan anggaran atau ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan.

Secara umum, pengelolaan Belanja Operasional dan Belanja Modal menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun 2022 ke 2023. Walaupun anggaran Belanja Operasional mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023, efisiensi realisasinya justru melonjak tajam hingga mencapai 97,83%. Sama halnya, Belanja Modal menunjukkan pencapaian yang selalu tinggi di atas 94% pada kedua tahun, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap investasi.

Namun, Pengeluaran Tak Terduga menjadi fokus utama. Pos ini menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dengan selisih besar antara anggaran dan realisasi, serta persentase realisasi yang sangat rendah (19,98% di 2022 dan 5,55% di 2023). Ini menunjukkan adanya alokasi anggaran yang terlalu besar atau kurangnya peristiwa tak terduga yang memerlukan pengeluaran itu, atau mungkin juga terdapat masalah dalam proses pencairan dana.

Identifikasi Pos Anggaran yang Paling Sering Menyimpang

Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi untuk tahun 2022 dan 2023, pos anggaran yang paling sering mengalami penyimpangan, baik dari segi selisih nominal maupun persentase realisasi, adalah **Belanja Tidak Terduga**.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2022:

- Anggaran : Rp. 468.969.961.965,00
- Realisasi : Rp. 93.700.984.191,00
- Selisih : Rp. 375.268.977.774,00
- Persentase Realisasi : 19,98%

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023:

- Anggaran : Rp. 425.194.924.725,00
- Realisasi : Rp. 23.602.781.810,00
- Selisih : Rp. 401.592.142.915,00
- Persentase Realisasi : 5,55%

Dari informasi di atas, tampak bahwa pengeluaran tak terduga mengalami perbedaan yang sangat signifikan antara anggaran dan realisasi. Pada tahun 2022, persentase realisasi hanya berada pada angka 19,98%, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anggaran yang terpakai. Di tahun 2023, keadaan ini semakin memburuk dengan tingkat realisasi yang jatuh drastis menjadi 5,55%. Ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pengeluaran tak terduga mungkin terlalu besar dan tidak masuk akal, atau ada hambatan dalam pelaksanaan yang menghalangi pemanfaatan anggaran tersebut.

Oleh karena itu, **Belanja Tidak Terduga** jelas merupakan item anggaran yang paling sering mengalami penyimpangan signifikan, baik dari segi jumlah selisih maupun persentase realisasi yang sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mencegah pemborosan serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Penilaian ini krusial untuk memastikan bahwa dana yang disediakan dapat dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, perlu diusahakan perbaikan dalam proses pengidentifikasian kebutuhan mendesak sehingga pengeluaran yang tidak terduga dapat lebih tepat dan efisien.

Faktor Penyebab Deviasi Anggaran

Kesenjangan yang jelas antara anggaran dan actual spending, khususnya pada komponen Belanja Tidak Terduga (BTT), disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit. Pertama, praktik penggelembungan anggaran sering dilakukan sebagai langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi kemungkinan risiko atau situasi darurat yang dapat timbul. Namun, dalam banyak situasi, kebutuhan nyata untuk pemanfaatan dana tersebut sering kali tidak terjadi, mengakibatkan anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara maksimal.

Kedua, proses penyaluran dana yang rumit dan birokratis menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pengeluaran, meskipun dana secara nominal telah tersedia. Regulasi yang rumit dan persyaratan administratif yang bertele-tele dapat menghambat pencairan dana, sehingga dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai waktu yang tepat (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ketiga, hambatan administratif dan teknis internal, seperti keterlambatan dalam pengiriman dokumen, proses perizinan yang berkepanjangan, atau bahkan pelaksanaan proyek yang memakan waktu, berkontribusi secara langsung terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hambatan-hambatan ini sering muncul di tingkat operasional, mengganggu kelancaran pemanfaatan dana yang telah dialokasikan.

Keempat, sikap hati-hati pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sering kali berkontribusi pada minimnya penggunaan dana BTT. Kekhawatiran mengenai penggunaan dana yang tidak benar atau kemungkinan penyimpangan membuat pemerintah daerah cenderung menunda pemanfaatan dana tersebut, meskipun terdapat kebutuhan yang valid. Terakhir, perubahan kondisi luar yang tiba-tiba, seperti ketiadaan bencana alam atau kejadian darurat lain yang sudah diperkirakan, secara langsung menjelaskan mengapa dana tak terduga tidak digunakan secara optimal (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023). Jika situasi terburuk tidak terjadi, dana yang disiapkan untuk menghadapinya akan tetap tidak terpakai.

Selain faktor-faktor internal dalam perencanaan dan pengelolaan, ketidaksesuaian anggaran ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan manajerial dari pemerintah daerah. Koordinasi yang tidak efektif antar sektor dalam pemerintahan daerah, serta kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola anggaran, dapat secara signifikan menghalangi proses

identifikasi kebutuhan darurat yang sebenarnya. Tanpa keterampilan manajerial yang cukup dan koordinasi yang efektif, sulit bagi pemerintah daerah untuk secara tepat menilai dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kemungkinan anggaran yang tidak terpakai, meskipun secara administratif dana tersebut telah tersedia dan siap digunakan.

Kesesuaian dengan Literatur Sebelumnya

Hasil dari analisis ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran, terutama pada kategori pengeluaran yang tidak terduga, adalah fenomena umum dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mardiasmo, 2009) yang menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak terduga merupakan hal yang kontingen; yaitu, dana tersebut disiapkan untuk kemungkinan yang belum pasti dan tidak selalu diharapkan untuk sepenuhnya terwujud. Dengan kata lain, apabila peristiwa yang diperkirakan tidak terjadi, adalah wajar jika dana tersebut tidak sepenuhnya terpakai. Selanjutnya, (Mahmudi, 2016) mendukung argumentasi ini dengan mengatakan bahwa rendahnya pelaksanaan anggaran tidak selalu secara absolut menunjukkan inefisiensi. Sebaliknya, keadaan tersebut kemungkinan mencerminkan perencanaan yang tidak matang dan birokrasi yang cenderung kaku dalam proses pencairan dana, sehingga menghambat penggunaan anggaran.

Temuan observasi ini didukung oleh laporan dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB, 2023). Kedua laporan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas manajerial dan minimnya pelatihan teknis untuk pengelola anggaran di tingkat daerah adalah faktor penting yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran daerah. Keterampilan manajerial yang kurang memadai dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengenali kebutuhan mendesak dengan tepat, sedangkan minimnya pelatihan teknis dapat menghambat efektivitas dalam proses administrasi dan penyaluran dana. Menarik untuk dicatat bahwa kasus di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yang menunjukkan belanja tidak terduga yang tidak dilaksanakan dalam skala besar bisa diartikan sebagai cerminan dari kestabilan keadaan daerah—misalnya, rendahnya bencana alam atau situasi darurat—dan bukan hanya sebagai kegagalan manajemen keuangan. Hal ini menekankan kebutuhan untuk memperhatikan konteks eksternal saat mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran.

Oleh karena itu, saat mengevaluasi penyimpangan anggaran, sangat penting untuk tidak hanya mempertimbangkan angka saja. Penilaian perlu memperhatikan kebutuhan sesungguhnya dari penggunaan dana tersebut, tingkat fleksibilitas regulasi yang ada dalam proses pencairan, serta kesiapan teknis yang tersedia pada tahap pelaksanaan. Ini mengandung arti bahwa analisis perlu bersifat holistik dan memperhitungkan berbagai aspek. Dalam rangka mengatasi persoalan penyimpangan anggaran ini dan sekaligus memaksimalkan penggunaan pengeluaran tak terduga, beberapa langkah strategis diperlukan. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pelaksanaan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan berbasis data, peningkatan kapasitas manajerial pengelola keuangan daerah melalui program pelatihan yang sesuai, serta penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Tahapan-tahapan ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan serta memastikan bahwa dana publik, khususnya yang

dialokasikan untuk keadaan darurat, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab.

Implikasi terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Kesenjangan signifikan antara anggaran dan realisasi pengeluaran menunjukkan bahwa perencanaan keuangan daerah belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan nyata. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik karena anggaran yang tidak terserap secara optimal menimbulkan kesan kurang efektif. Penting untuk menciptakan sistem pelaporan yang transparan dan pengawasan yang ketat, karena akuntabilitas dan keterbukaan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Anggaran yang tidak dimanfaatkan, terutama Belanja Tidak Terduga (BTT), menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pembagian anggaran. Walaupun pengalokasian dana cadangan sangat penting, perkiraan yang berlebihan dapat mengakibatkan anggaran tidak terpakai (idle budget) dan menjadi tidak efisien (Mahmudi, 2016). Pendekatan anggaran yang berfokus pada kebutuhan (needs-based budgeting) menjadi sangat penting untuk meningkatkan kelincahan dan pengendalian (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019), sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif dan efisien.

Jumlah anggaran yang tidak terpakai juga mencerminkan lemahnya persiapan teknis dan administratif, khususnya dalam situasi darurat. Hal ini membutuhkan peningkatan kemampuan manajerial, pelatihan sumber daya manusia, serta penyederhanaan proses pencairan dana darurat untuk mempercepat dan memastikan akuntabilitas (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Reevaluasi estimasi anggaran BTT dan peningkatan perencanaan skenario (scenario planning) merupakan langkah reformasi utama untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan pemanfaatan anggaran (Kristiansen & Pratikno, 2006).

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi menekankan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan meningkatkan SDM, menerapkan anggaran sesuai kebutuhan, dan melakukan perencanaan yang adaptif, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan warga dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Reformasi ini akan memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap situasi pengelolaan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023 yang sangat efisien di beberapa pos utama. Peningkatan yang mencolok dalam realisasi Belanja Operasional, dari 83,15% pada tahun 2022 menjadi 97,83% pada tahun 2023, serta konsistensi Belanja Modal yang terus berada di atas 94%, mencerminkan kemajuan signifikan dalam kemampuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang penting.

Namun, di balik prestasi baik ini, terungkap kelemahan signifikan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Deviasi yang sangat mencolok, dengan realisasi hanya sekitar 19,98% pada tahun 2022 dan bahkan menurun tajam menjadi 5,55% pada tahun 2023, menunjukkan adanya masalah

serius yang bersifat multidimensional. Ini bukan hanya ketidakakuratan kecil dalam perencanaan; tetapi juga mencerminkan prosedur distribusi dana yang terlalu kaku dan rumit, serta adanya hambatan administratif yang signifikan yang menghalangi penggunaan dana BTT secara maksimal. Inefisiensi yang signifikan pada posisi ini dapat merusak efektivitas keseluruhan anggaran daerah, terutama saat menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan tindakan cepat.

Karena itu, kebutuhan untuk meningkatkan sistem perencanaan anggaran yang lebih responsif dan berfokus pada kebutuhan nyata menjadi sangat mendesak. Ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas manajerial dan teknis dari aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperkirakan kebutuhan BTT dengan lebih tepat. Selanjutnya, penyederhanaan prosedur birokrasi yang berlebihan dan penilaian rutin yang ketat terhadap setiap penggunaan anggaran, termasuk BTT, merupakan langkah penting. Pelaksanaan langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjamin bahwa setiap rupiah APBD dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Jawa Barat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini dengan jelas menunjukkan pentingnya untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dengan penekanan utama pada mengurangi selisih antara anggaran dan realisasi, agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan optimal

REFERENSI

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022*. Bandung: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023, Agustus). *Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022*. Diambil kembali dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat : https://jabar.bpk.go.id/files/2023/08/LK-TA-2022_p1-p89.pdf
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023, Agustus 29). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022*. Diambil kembali dari BPKAD Provinsi Jawa Barat: https://bpkad.jabarprov.go.id/2023/08/29/laporan-realisasi-anggaran-lra-tahun-2022/?utm_source=
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024, Agustus 16). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023*. Diambil kembali dari BPKAD Provinsi Jawa Barat: https://bpkad.jabarprov.go.id/2024/08/16/laporan-realisasi-anggaran-lra-tahun-2023/?utm_source=
5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga*. Jakarta: DJKP.
6. DJPK Kemenkeu. (2025). *Apakah yang dimaksud dengan Belanja Tidak Terduga*. Diambil kembali dari djpk.kemenkeu.go.id: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-tidak-terduga>
7. Halim, A. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empay.
8. Kementerian PAN-RB. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.

9. Kristiansen , S., & Pratikno. (2006). Decentralising Education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 513-531.
10. Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
11. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
12. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019*. Paris: OECD Publishing.
13. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Bandung: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.